

INTERDEPENDENSI EKONOMI DI ASIA-PASIFIK DALAM TAHUN 1980-AN

Hadi SOESASTRO*

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya Perang Dunia II perdagangan internasional meningkat hampir dua kali lebih cepat daripada pertumbuhan produksi dunia. Artinya, dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekonomi-ekonomi nasional semakin besar bagian yang diperdagangkan secara internasional. Perdagangan internasional, apabila diselenggarakan sesuai dengan dalil-dalil ekonomi, memang dapat diperkirakan akan menjadi semakin intensif dan ekstensif. Salah satu faktor penting yang telah memungkinkan terjadi percepatan pertumbuhan produksi dunia dan sekaligus memperluas arus pertukaran barang dan jasa secara internasional adalah ekspansi arus modal dan investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan internasional. Arus modal melalui jalur ini juga diikuti oleh pengalihan teknologi.

Pola perkembangan seperti di atas membawa interdependensi (kesalingtergantungan) yang semakin besar antara ekonomi-ekonomi nasional. Namun interdependensi ini juga menimbulkan masalah-masalahnya sendiri. Dengan kenyataan interdependensi ini maka dalam merumuskan kebijaksanaan nasional di sesuatu negara semakin perlu diperhitungkan

* Penulis berterimakasih atas sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Prof. Panglaykim dan Dr. R.B. Soehartono dalam penyusunan kertas ini.

perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar domain nasionalnya.¹

Masalah pertama yang dihadapi adalah menyangkut *kedaulatan* sesuatu negara dalam usahanya untuk merealisasikan tujuan-tujuan nasionalnya mengingat bertambahnya "kepekaan" ekonominya terhadap apa-apa yang terjadi secara eksternal. Pada umumnya terdapat anggapan bahwa meningkatnya interdependensi ekonomi ini mengurangi kemanjuran kebijaksanaan-kebijaksanaan nasional. Contoh aktual adalah jalannya perdebatan mengenai kebijaksanaan energi di Amerika Serikat dengan pengaruh langsung terhadap nilai mata-uang dollar, seperti tercermin di pasaran mata-uang asing di London, Frankfurt dan Tokyo. Perubahan-perubahan dalam nilai mata-uang dollar secara mendadak dalam besaran yang cukup berarti akan segera mempengaruhi perdagangan internasional dan ekonomi-ekonomi nasional yang terlihat dalam interaksi ini.

Semakin peka sesuatu negara terhadap kondisi ekonomi eksternal, semakin berkurang pula peluangnya untuk menyelenggarakan kebijaksanaan-kebijaksanaan fiskal dan moneter yang bersifat otonom. Dalam hubungan ini di banyak negara dewasa ini otoritas moneternya menghadapi gejala yang disebut "inflasi yang diimpor" yang penanganannya seringkali meminta pengorbanan terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negerinya. Namun demikian, masalah ini tidak mutlak harus dianggap membahayakan sejauh dilakukan perhitungan yang tepat dan persiapan yang baik. Secara essensial terdapat perbedaan antara "kepekaan" (sensitivity) dan "kerawanan" (vulnerability). Dalam pengertian kepekaan di atas ada terkandung kemungkinan menyelaraskan kebijaksanaan-kebijaksanaan, sehingga hasil yang bisa diperoleh sudah dapat diperkirakan sejak semula. Sebaliknya, dalam pengertian kerawanan terdapat aspek kejutan-kejutan atau "surprise" dengan akibat yang sukar diperhitungkan sebelumnya.

1 Lihat Robert Soloman dan Anne Gault, *The Interdependence of Nations: An Agenda for Research*, A Report to the National Science Foundation (Washington, D.C.: The Brookings Institution, December 1977)

Masalah kedua menyangkut persoalan cara mengorganisasikan hubungan-hubungan ekonomi internasional sedemikian sehingga sistem hubungan ini sesuai dengan kenyataan interdependensi masa kini. Tema utama kerja sama ekonomi dewasa ini masih tetap akan berpusat pada persoalan bagaimana sesuatu negara dapat mempertahankan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari transaksi ekonomi yang semakin luas dengan negara-negara lainnya dan pada saat yang sama tetap dapat memelihara kebebasan yang diperlukan negara tersebut untuk dapat merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi dan sosialnya.

MENGHADAPI KENYATAAN INTERDEPENDENSI

Oleh banyak pemerintah-pemerintah telah disadari bahwa interdependensi ekonomi meminta suatu usaha politik dalam lingkup internasional untuk mengkoordinasikan atau menyelaraskan, dalam batas-batas tertentu, berbagai kebijaksanaan ekonomi nasional. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah-pemerintah ini juga mengetahui bahwa secara politis mereka diminta bertanggungjawab atas kesulitan-kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Biasanya tekanan-tekanan di dalam negeri cukup kuat dan mendorong pemerintah-pemerintah ini untuk mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan perlindungan (proteksi) yang dapat tampak dengan nyata. Perdagangan merupakan mekanisme yang mudah terlihat efeknya terhadap perusahaan-perusahaan dan bisnis atau kelompok-kelompok kepentingan tertentu, seperti lembaga-lembaga konsumen atau serikat-serikat buruh. Cara-cara yang lazimnya ditempuh paling dahulu adalah melalui aturan-aturan perdagangan luar negeri, baik berupa hambatan tarif maupun nontarif atau tindakan-tindakan proteksi lainnya.

Pergeseran-pergeseran yang hakiki telah terjadi sejak permulaan tahun 1970-an ini dalam interaksi antara ekonomi-ekonomi nasional. Konjungtur (business cycles) di negara-negara industri tidak lagi bergerak dengan pola saling mengimbangi sehingga dapat saling membantu menarik sesuatu negara ke luar

dari keadaan resesi, tetapi kini berkecenderungan untuk berjalan secara sinkron. Hal ini memperbesar tekanan-tekanan inflasi. Selain itu, sejak tahun 1971 banyak negara menggantungkan diri kepada penyesuaian-penyesuaian nilai mata-uang (kurs) sebagai instrumen utama untuk mencapai ekuilibrium neraca pembayarannya. Di bawah sistem ini, otoritas-otoritas moneter nasional mendapat peluang untuk menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang semakin berbeda satu dengan yang lainnya, hal mana secara potensial memperbesar perbedaan tingkat-tingkat inflasi nasional. Ternyata selama tahun 1970-an ini terlihat akibat-akibat di atas, dan dalam suasana ini semakin besar ketidakpastian moneter dan finansial pada tingkat internasional.¹ Ditambah lagi dengan eskalasi harga minyak bumi, selalu terdapat bahaya resesi. Kenaikan harga minyak bumi dalam tahun 1973 dan 1974 dalam suasana ketidakpastian moneter dan pola konjungtur di atas telah menciptakan resesi dunia yang paling dalam setelah Perang Dunia II.

Dalam situasi memulihkan ekonomi dan mengatasi masalah-masalah penyesuaian neraca pembayaran masalah yang utama menyangkut "daya tarik" (pull) yang dapat diciptakan bagi setiap ekonomi melalui peningkatan perdagangannya (ekspor) dengan negara-negara lain.² Negara-negara yang mempunyai hutang luar negeri yang tinggi, untuk membiayai pembangunan atau defisit neraca perdagangannya, juga melihat pertumbuhan ekspornya sebagai sarana penting untuk meningkatkan kemampuannya membayar kembali hutang-hutang tersebut. Negara-negara yang menghadapi masalah pengangguran yang tinggi dan tingkat permintaan dalam negeri yang rendah (sluggish domestic demand) juga melihat perdagangan internasional sebagai lokomotif untuk menggerakkan ekonominya kembali.

Namun demikian, dalam situasi ekonomi dunia seperti di atas, justru prospek bagi peningkatan perdagangan internasional

1 Lihat Rodney T. Smith dan Hadi Soesastro, *International Capital Markets in the 1970s* (Santa Monica, Calif.: The Rand Corporation, July 1977)

2 Pembahasan lebih lanjut mengenai masalah ini, lihat Harald B. Malmgren, "Impact of Trade Policies on the World Economy", *Economic Impact*, 2, 1978

menghadapi berbagai ancaman. Ancaman ini timbul dengan meningkatnya nasionalisme ekonomi dan intervensi yang berlebihan oleh pemerintah-pemerintah di sektor eksternal dari ekonominya. Di satu pihak, masing-masing negara berusaha meningkatkan ekspornya, tetapi di pihak lain, negara-negara ini juga berusaha membatasi pasaran dalam negerinya bagi ekspor negara-negara lain. Sokoguru perdagangan internasional yang utama, yaitu sistem nilai tukar mata-uang yang tetan (*fixed exchange rate*) dan perdagangan bebas (*free trade*), telah diganti dengan sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate*) dan berbagai bentuk "organized free trade", seperti yang dikenal dengan sebutan "orderly marketing agreements (OMAs)". Kompleksitas dan keragaman bentuk intervensi yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang diberlakukan di banyak negara telah menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional, khususnya yang menyangkut akses ke pasaran-pasaran luar negeri.

Pemulihan ekonomi dari keadaan resesi dalam pertengahan tahun 1970-an ini terjadi dengan sangat lambat. Penanaman modal di negara-negara industri berada jauh di bawah tingkat yang terjadi pada usaha-usaha pemulihan ekonomi di masa-masa lalu. Inflasi yang berkepanjangan juga telah mengganggu pasaran dunia secara keseluruhan, sementara tingkat pengangguran tetap cenderung untuk meningkat, khususnya di Eropa Barat. Hanya sebagian kecil negara-negara berhasil mengendalikan inflasi, tetapi negara-negara ini malahan menghadapi kenyataan bahwa nilai mata uangnya mengalami apresiasi pada tingkat yang dapat mengancam ekspansi ekonominya.

Jepang termasuk salah satu negara yang menghadapi keadaan di atas. Tetapi dengan strategi ekspornya yang agresif, Jepang masih dapat melanjutkan penetrasinya ke beberapa pasaran yang utama. Biarpun demikian Jepang tidak akan mudah lagi menghadapi hambatan-hambatan dan proteksi perdagangan yang cenderung berkembang, khususnya di negara-negara industri. Perjanjian-perjanjian dalam rangka MTN

(Multilateral Trade Negotiations) pertengahan tahun 1979 ini masih harus diuji kemanjurannya. Selama ini tindakan-tindakan balasan (countervailing measures) yang diambil oleh banyak negara terhadap Jepang ditujukan untuk mengubah strategi Jepang dan agar Jepang membuka ekonominya untuk hasil-hasil industri mereka. Dengan cara ini diharapkan Jepang dapat didorong untuk menjadi suatu "full-fledged trading nation" dan tidak mempertahankan kedudukannya sebagai "exporting country" belaka. Untuk dapat merealisasikan tujuan ini Jepang harus mengadakan *penyesuaian struktural* dari ekonominya. Pada saat ini sebenarnya Jepang sudah berada dalam proses perubahan struktural tersebut.

Perubahan struktural ini juga perlu dilakukan oleh negara-negara industri lainnya. Amerika Serikat, walaupun menganut falsafah perdagangan bebas, pada saat ini tetap melaksanakan tindakan-tindakan pembatasan dalam bidang perdagangan. Menurut pengamatan, proteksionisme di Amerika Serikat diselenggarakan dalam bentuk terselubung, misalnya dalam membatasi masuknya alat-alat televisi Jepang tidak ditetapkan suatu kuota impor tetapi ditetapkan dengan jalan "orderly marketing agreements". Masalah utama yang dihadapi pemerintah Amerika Serikat adalah struktur ekonominya yang tidak memungkinkan terjadinya koeksistensi antara neraca perdagangan jangka-panjang yang sehat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima secara politis.¹ Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk impor di Amerika Serikat lebih besar daripada yang terdapat di negara-negara partner dagangnya yang utama. Hal ini berarti bahwa dengan cara memperlambat pertumbuhan ekonomi saja tidak pernah akan dicapai keseimbangan neraca pembayaran. Kekurang-percayaan pasaran mata-uang asing (foreign exchange markets) terhadap kemampuan pemerintah Amerika Serikat untuk mencapai kemajuan yang berarti dalam neraca transaksi berjalannya (current account) mengakibatkan dipercepatnya nilai dollar mengalami kemerosotan.

1. Lihat J. Alexander Caldwell, *The International Economic and Financial Outlook: Perspectives for 1979*, Presented to the Foreign Trade Association of Southern California, November 1978

Bersamaan dengan perubahan-perubahan dalam perdagangan internasional dan dunia finansial seperti diuraikan di atas, tampak telah terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di banyak negara yang selama ini masih terbelakang. Kedudukan bersaing negara-negara berkembang sedang mengalami perubahan dengan perubahan dari titik berat strategi pembangunannya, dari produsen bahan-bahan primer ke arah perdagangan hasil-hasil industri manufacturing. Seketika negara-negara berkembang ini menaiki anak tangga pembangunan maka tidak bisa dihindarkan bahwa mereka menjadi saingan dari industri-industri di negara-negara maju yang sebenarnya telah menjadi semakin rawan.

Pengaturan pola produksi dan perdagangan dunia akan mempengaruhi kemampuan bersaing negara-negara atau sektor-sektor tertentu di masing-masing negara. Meningkatnya interdependensi, yang termanifestasikan dalam pengaruh-pengaruh terhadap kemampuan bersaing, diharapkan akan menggerakkan proses perubahan-perubahan struktural secara terus-menerus, khususnya di negara-negara industri. Tetapi lambatnya peningkatan penanaman modal di negara-negara industri mempersulit perubahan struktural ini. Sementara itu pemerintah-pemerintah negara-negara tersebut menghadapi tekanan-tekanan yang semakin meningkat untuk melindungi sektor-sektor yang berada dalam kesulitan melalui cara-cara intervensi di sektor eksternal dari ekonominya. Dalam keadaan di mana tingkat pengangguran di negara-negara industri itu sudah cukup tinggi maka semakin sulit diharapkan adanya usaha untuk menghindarkan proteksi perdagangan terhadap ekspor negara-negara berkembang.

Sejauh ini banyak negara berkembang meningkatkan hutang luar negerinya untuk dapat membiayai impor dari negara-negara industri. Selama tahun-tahun terakhir ini tingkat pinjaman yang tinggi oleh negara-negara berkembang ini sebenarnya telah membantu memperlemah resesi dunia. Selain itu pengalaman dalam tahun 1970-an ini juga menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekspor yang

tinggi *juga* merupakan negara-negara yang menjadi pasaran yang semakin besar bagi ekspor hasil-hasil industri negara-negara maju. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di negara-negara berkembang meningkatkan interdependensinya dengan negara-negara industri. Tetapi interdependensi ini belum bersifat *simetris*.

Hubungan yang tidak simetris ini mengambil berbagai macam bentuk. Salah satu contoh hubungan seperti ini adalah hubungan ekonomi dan perdagangan antara Jepang dan ASEAN, yang sering kali dilihat sebagai pola hubungan yang bersifat kliental (*client-patron relationship*).¹ Tuntutan negara-negara berkembang untuk menciptakan tata ekonomi internasional yang baru dapat dilihat sebagai usaha negara-negara berkembang untuk menciptakan interdependensi ekonomi dengan negara-negara industri yang bersifat lebih simetris.

PROSPEK DI KAWASAN ASIA-PASIFIK

Dari tinjauan global di atas, Kawasan Asia-Pasifik menduduki tempat yang cukup unik. Sejauh ini, dengan berbagai kesulitan yang terjadi di dunia, Kawasan Asia-Pasifik telah dapat mempertahankan dinamisme yang cukup mengesankan.² Pertumbuhan ekonomi di kawasan ini telah meletakkan kawasan ini di atas bagian dunia lainnya.

Ulasan data secara singkat di bawah ini menunjukkan bahwa di Kawasan Asia-Pasifik telah terjadi perubahan-perubahan dan pergeseran-pergeseran dalam pola produksi dan perdagangan. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa hasil dari perubahan dan pergeseran ini telah membantu perkembangan di banyak negara berkembang di kawasan ini.

1 Lihat J. Panglaykim, "Japan-ASEAN Trade Relations: Some Problems and Prospects", dalam *Japan-Indonesia Relations in a Global Context* (Tokyo: Japan Institute of International Affairs, October 1978)

2 Dalam kertas ini Kawasan Asia-Pasifik terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru dalam kelompok negara industri, dan Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Pilipina, Muangthai, dan Indonesia dalam kelompok negara berkembang.

Tabel 1

PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA-PASIFIK 1961-1978

	Ekspor Intra-Kawasan ^{a)}							Impor Intra-Kawasan ^{a)}						
	1961	1964	1967	1970	1974	1977	1978	1961	1964	1967	1970	1974	1977	1978
<i>Neg. Industri ^{b)}</i>														
Amerika Serikat	32,5	32,1	40,0	40,5	40,7	40,1	39,2	37,4	40,4	45,9	52,0	45,1	44,9	46,7
Kanada	61,4	60,9	72,0	69,2	71,4	75,3	75,6	70,5	73,3	77,0	75,3	72,2	76,2	76,4
Australia	40,3	40,8	47,8	56,8	59,5	60,8	62,5	35,5	43,4	46,4	48,7	52,5	56,4	57,0
Jepang	52,9	53,2	56,9	58,5	50,0	49,9	52,7	60,6	54,5	52,6	56,1	49,2	47,6	48,8
Selandia Baru	26,2	25,0	33,9	41,0	47,1	47,3	53,0	34,9	42,7	45,9	50,1	56,6	56,4	56,9
<i>Neg. Berkembang ^{b)}</i>														
Singapura ^{c)}	42,2	...	51,1	54,7	61,8	61,0	60,9	49,0	...	61,8	65,5	56,4	55,8	57,5
Hong Kong	53,2	53,2	60,2	60,4	57,5	59,6	60,1	42,8	44,8	46,4	51,6	55,2	58,5	56,3
Taiwan	78,8	71,6	71,4	80,0	76,8	72,5	73,4	80,5	80,0	84,2	81,1	69,8	72,4	68,6
Korea	39,9	79,4	81,8	85,0	77,8	64,2	63,9	80,3	85,2	86,5	82,0	75,0	70,9	68,6
Malaysia	51,2	...	65,0	65,8	62,5	65,2	67,4	51,7	...	42,7	54,0	59,5	63,9	64,9
Pilipina	81,9	77,5	84,5	89,6	83,2	68,8	72,4	77,3	73,7	74,0	74,5	64,1	64,2	65,6
Muangthai	68,6	69,2	67,5	67,3	67,1	58,7	57,1	64,0	65,4	64,2	63,9	55,7	57,5	60,4
Indonesia	68,2	61,9	64,3	79,5	86,8	83,8	83,9	52,2	58,4	66,3	59,8	66,6	64,7	66,8

a) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan dunia

b) Urutan berdasarkan tingkat GNP per kepala yang tertinggi (tahun 1977)

c) Angka-angka perdagangan Singapura tidak termasuk dengan Indonesia

Sumber: Diolah dari IMF, *Direction of Trade* (berbagai nomor penerbitan)

Interaksi ekonomi antara negara-negara tercermin dalam pola hubungan perdagangan, dan pada dasarnya data-data perdagangan ini merupakan manifestasi dari perkembangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang bersangkutan. Tabel 1 menunjukkan perkembangan perdagangan intra-Kawasan Asia-Pasifik selama periode 1961-1978. Kesan utama yang diperoleh dari data ini adalah sebagai berikut:

- a) perdagangan (ekspor dan impor) intra-kawasan, yaitu antara negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik, telah menjadi semakin intensif selama periode 1961-1978 ini. Artinya, bagi setiap negara di kawasan ini bagian dari keseluruhan ekspor dan impornya dengan dunia yang dilakukan dengan negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik sendiri menjadi semakin besar. Sebagai contoh, pada tahun 1961 ekspor Australia ke negara-negara di kawasan ini adalah 40,3% dari seluruh eksportnya; pada tahun 1978 bagian ini meningkat menjadi 62,5%. Impor Australia dari kawasan ini juga meningkat dari 35,5% pada tahun 1961 menjadi 57% pada tahun 1978 dari keseluruhan impornya.
- b) pergeseran di atas sangat jelas terjadi dalam periode 1961-1970, dan mengalami perubahan dalam periode selanjutnya, khususnya setelah terjadi kenaikan harga minyak bumi pada tahun 1973 dan 1974. Ekspansi perdagangan di kawasan ini agak mengalami pengalihan (diverted) sebagai akibat kenaikan harga minyak bumi, khususnya yang menyangkut negara-negara pengimpor minyak. Sebagai contoh, pada tahun 1970 sekitar 52% impor Amerika Serikat berasal dari kawasan ini (37,4% pada tahun 1961), tetapi menurun menjadi 45,1% pada tahun 1974. Untuk Jepang, impor dari kawasan ini mencapai 56,1% pada tahun 1970 tetapi menurun menjadi 49,2% pada tahun 1974. Hal yang sama juga dialami beberapa negara berkembang di kawasan ini, misalnya impor Korea dari kawasan menurun dari 82% (1970) menjadi 75% (1974); impor Taiwan dari kawasan menurun dari 81,1% (1970) menjadi 69,8% (1974). Untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan dengan negara-negara di kawasan, maka ekspor negara-negara ini ke Kawasan Asia-Pasifik juga mengalami penurunan. Misalnya

ekspor Korea ke kawasan juga menurun dari 85% (1970) menjadi 77,8% (1974); ekspor Taiwan ke kawasan ini menurun dari 80% (1970) menjadi 76,8% (1974). Tabel 2 memberikan data perkembangan perdagangan beberapa negara Asia-Pasifik dengan kelompok negara pengeksport minyak. Tabel ini menerangkan pengalihan arah perdagangan ini sebagai akibat dari impor minyak yang melonjak dengan tiba-tiba pada tahun 1974.

- c) pergeseran di atas tidak berlaku untuk negara-negara yang dapat mencukupi kebutuhan energinya sendiri, baik negara berkembang (Indonesia, Malaysia) maupun negara industri (Kanada, Australia). Tetapi ada juga kemungkinan bahwa pergeseran di atas hanya bersifat temporer. Seperti terlihat dari Tabel 1 dan Tabel 2, pada tahun 1978 telah terjadi peningkatan kembali dalam perdagangan negara-negara pengimpor minyak dengan Kawasan Asia-Pasifik dan penurunan dalam perdagangannya dengan kelompok negara pengeksport minyak. Misalnya, impor Amerika Serikat dari negara-negara pengeksport minyak meningkat dari 3,9% (1970) menjadi 14,9% (1974) dan meningkat lagi menjadi 22,5% pada tahun 1977, tetapi dalam tahun 1978 menurun menjadi 17,7%. Perkembangan yang sama juga terlihat untuk Jepang dan Korea. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat kemungkinan perdagangan intra-Kawasan Asia-Pasifik akan meningkat lagi.

Salah satu alasan yang dapat menerangkan mengapa gejala pengalihan perdagangan ini (trade diversion) ke kelompok negara-negara pengeksport minyak ini hanya bersifat temporer adalah kenyataan terbatasnya kapasitas absorpsi sebagian terbesar negara-negara pengeksport minyak di Timur Tengah. Sesedikitnya, dapat dikatakan bahwa kapasitas absorpsi ini lebih tinggi di Kawasan Asia-Pasifik daripada di Timur Tengah. Tampaknya perbedaan kapasitas absorpsi ini mempengaruhi arah perdagangan internasional. Seperti diuraikan sebelumnya, pada saat ini bagi banyak negara ekspor memegang peranan yang penting dalam usaha mempertahankan laju pertumbuhan ekonominya.

Tabel 2

PERDAGANGAN BEBERAPA NEGARA ASIA-PASIFIK DENGAN KELOMPOK NEGARA PENGEKSPOR
MINYAK ^{a)} 1970-1978

	Ekspor ^{b)}				Impor ^{b)}			
	1970	1974	1977	1978	1970	1974	1977	1978
Amerika Serikat	4,4	6,5	11,2	11,2	3,9	14,9	22,5	17,7
Jepang	5,0	9,7	14,6	14,4	15,0	32,7	35,3	32,0
Taiwan	4,6	5,3	8,5	8,0	4,8	13,9	15,0	17,2
Korea	1,9	3,8	12,4	11,8	6,5	16,4	21,4	17,3
Pilipina	0,2	1,0	3,9	4,0	8,4	17,6	15,2	17,2
Muangthai	5,1	10,6	12,5	11,2	5,2	16,9	15,8	14,0

a) Ekspor Ke dan Impor Dari Kelompok Negara Pengekspor Minyak, terdiri dari Algeria, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Oman, Qatar, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Venezuela

b) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan dunia

Sumber: Diolah dari IMF, *Direction of Trade* (berbagai nomor penerbitan)

Tabel 3

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN KAWASAN ASIA-PASIFIK a) 1964-1978

	1964	1967	1970	1974	1977	1978
	92.237	123.809	192.725	506.561	671.003	784.832
Asia-Pasifik (juta \$ (%))	100	100	100	100	100	100
Neg. Industri	89,1	89,1	87,2	83,8	82,0	81,1
Amerika Serikat	50,2	48,5	44,5	40,8	41,6	41,6
Kanada	15,4	16,7	16,6	14,0	12,7	12,0
Australia	6,5	5,7	5,1	4,6	4,0	3,8
Jepang	14,9	16,7	19,8	23,2	22,7	22,7
Selandia Baru	2,2	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9
Neg. Berkembang	10,9	10,9	12,8	16,2	18,0	18,9
Singapura	...	0,8	2,1	2,8	2,8	2,9
Hong Kong	2,3	2,4	2,8	2,5	3,0	3,2
Taiwan	0,9	1,2	1,5	2,5	2,7	3,0
Korea	0,6	1,1	1,5	2,2	3,1	3,5
Malaysia	...	1,4	1,6	1,7	1,6	1,7
Pilipina	1,7	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1
Muangthai	1,4	1,4	1,0	1,1	1,2	1,2
Indonesia	1,3	1,1	1,1	2,2	2,6	2,3
Dunia (juta \$)	309.439	387.063	579.146	1.549.499	2.092.700	2.432.300
Asia-Pasifik sebagai % dari Dunia	(29,8)	(32,0)	(33,3)	(32,7)	(32,1)	(32,3)
Pengekspor Minyak (juta \$)	15.995	18.958	27.602	146.805	228.946	244.140
Pengekspor Minyak sebagai % dari Dunia	(5,2)	(4,9)	(4,8)	(9,5)	(10,9)	(10,0)

a) Total ekspor dan impor dengan dunia masing-masing negara di Kawasan Asia-Pasifik
 Sumber: Diolah dari *IMF Direction of Trade* (berbagai nomor penerbitan)

Tabel 3 menunjukkan perkembangan perdagangan (ekspor dan impor) negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik dengan dunia selama periode 1974-1978. Bagian Kawasan Asia-Pasifik dari keseluruhan perdagangan dunia meningkat dari 29,8% pada tahun 1964 menjadi 33,3% pada tahun 1970, tetapi menurun menjadi 32,7% (1974) dan 32,1% (1977). Dalam tahun 1978 bagian ini bertahan pada tingkat 32,3% dari keseluruhan perdagangan dunia. Walaupun kenaikan harga minyak bumi meningkatkan bagian dari kelompok negara pengekspor minyak dalam perdagangan dunia, dari 4,8% pada tahun 1970 menjadi 10,9% pada tahun 1977, tetapi tampaknya bagian dari Kawasan Asia-Pasifik tidak mengalami penurunan yang berarti. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa peranan yang penting dalam mempertahankan posisi Asia-Pasifik telah dimainkan oleh negara-negara berkembang dalam kawasan ini. Dari keseluruhan perdagangan Kawasan Asia-Pasifik, pada tahun 1964 bagian dari kelompok negara berkembang adalah 10,9%, dan meningkat secara pesat sejak tahun 1970 sehingga mencapai 18,9% pada tahun 1978. Peranan yang utama telah diambil oleh Korea, Taiwan dan Hong Kong.

Meningkatnya peranan kelompok negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik ini terlihat dari Tabel 4 dan Tabel 5, yaitu distribusi perdagangan intra-Kawasan Asia-Pasifik. Tabel 4 menggambarkan perkembangan perdagangan intra-kawasan ditinjau dari ekspor dan impor negara-negara ini dengan kelompok negara industri di kawasan. Secara umum dapat dilihat bahwa baik ekspor ke maupun impor dari kelompok negara industri oleh kelompok negara industri itu sendiri telah menurun selama periode 1961-1978. Artinya, kelompok negara berkembang menjadi partner perdagangan yang semakin penting bagi kelompok negara industri di Kawasan Asia-Pasifik ini. Hal ini terlihat dengan jelas dari Tabel 5. Sebagai contoh, pada tahun 1961 ekspor Amerika Serikat ke kelompok negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik adalah 15,1% dari seluruh eksportnya ke Kawasan Asia-Pasifik, tetapi pada tahun 1978 telah meningkat menjadi 20,9%. Demikian pula impor Amerika Serikat dari kelompok negara berkembang meningkat dari

Tabel 4

DISTRIBUSI PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA-PASIFIK EKSPOR KE DAN IMPOR DARI KELOMPOK NEGARA INDONESIA a) 1961-1978

	Ekspor b)							Impor b)						
	1961	1964	1967	1970	1974	1977	1978	1961	1964	1967	1970	1974	1977	1978
<i>Neg. Industri</i>														
Amerika Serikat	84,9	86,9	85,8	84,9	82,8	80,5	79,1	84,5	85,4	86,7	85,6	79,2	74,6	74,3
Kanada	98,5	98,2	98,9	98,8	98,6	98,3	98,1	99,0	90,6	98,6	98,1	97,5	96,6	96,6
Australia	84,6	83,6	81,2	83,1	80,2	81,6	77,0	85,9	87,6	89,9	91,2	84,8	81,7	81,6
Jepang	58,6	65,0	63,1	64,4	61,2	60,7	58,6	81,4	77,4	77,4	77,0	64,8	62,4	61,9
Selandia Baru	96,6	94,0	94,7	95,9	86,2	81,2	80,9	92,8	93,0	93,7	94,0	88,3	90,2	89,3
<i>Neg. Berkembang</i>														
Singapura	58,5	...	52,6	43,3	53,9	52,6	52,1	79,8	...	67,8	54,7	63,3	60,0	61,6
Hong Kong	54,7	62,6	69,8	81,1	72,3	75,2	73,5	72,9	75,4	77,6	78,1	68,1	67,2	67,3
Taiwan	66,6	73,6	69,2	75,0	78,0	78,3	78,3	92,4	89,4	90,7	87,8	85,1	83,7	86,3
Korea	45,4	79,0	88,8	91,8	89,8	87,5	87,9	91,3	93,7	89,0	87,8	89,2	89,3	90,5
Malaysia	90,6	...	88,8	54,6	55,7	63,8	64,4	37,1	...	82,9	62,6	68,6	68,9	70,3
Pilipina	96,7	96,1	91,8	92,1	95,0	89,7	84,1	88,7	90,9	91,6	89,9	91,0	83,0	81,6
Muangthai	34,0	38,9	53,8	59,0	52,2	52,5	57,6	71,1	80,4	87,2	88,6	88,5	84,5	79,6
Indonesia	87,0	86,9	89,7	72,2	86,5	82,0	83,8	80,5	68,0	58,8	83,8	75,2	68,2	70,8

a) Ekspor Ke dan Impor Dari Kelompok Negara Industri di Kawasan Asia-Pasifik, terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang dan Selandia Baru

b) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan Kawasan Asia-Pasifik

Sumber: Diolah dari IMF, *Direction of Trade* (berbagai nomor penerbitan)

Tabel 5

DISTRIBUSI PERDAGANGAN INTRA-KAWASAN ASIA-PASIFIK EKSPOR KE DAN IMPOR DARI KELOMPOK NEGARA BERKEMBANG ^{a)} 1961-1978

	Ekspor ^{b)}							Impor ^{b)}						
	1961	1964	1967	1970	1974	1977	1978	1961	1964	1967	1970	1974	1977	1978
<i>Neg. Industri</i>														
Amerika Serikat	15,1	13,1	14,2	15,1	17,2	19,5	20,9	15,5	15,6	13,3	14,4	20,8	25,4	25,7
Kanada	1,5	1,8	1,1	1,2	1,4	1,7	1,9	1,0	1,4	1,4	1,9	2,5	3,4	3,4
Australia	15,4	16,4	18,8	16,9	19,8	18,4	23,0	14,1	12,4	10,1	8,8	15,2	18,3	18,4
Jepang	41,4	35,0	36,9	35,6	38,8	39,3	41,4	18,6	22,6	22,6	23,0	35,2	37,6	38,1
Selandia Baru	3,4	6,0	5,3	4,1	13,8	18,8	19,1	7,2	7,0	6,3	6,0	11,7	9,8	10,7
<i>Neg. Berkembang</i>														
Singapura	41,5	...	47,4	56,7	46,1	47,4	47,9	20,2	...	32,2	45,3	36,7	40,0	38,4
Hong Kong	45,3	37,4	30,2	18,9	27,7	24,8	26,5	27,1	24,6	22,4	21,9	31,9	32,8	32,7
Taiwan	33,4	26,4	30,8	25,0	22,0	21,7	21,7	7,6	10,6	9,3	12,2	14,9	16,3	13,7
Korea	54,6	21,0	11,2	8,2	10,2	12,5	12,1	8,7	6,3	11,0	12,2	10,8	10,7	9,5
Malaysia	9,4	...	11,2	45,4	44,3	36,2	35,6	62,9	...	17,1	37,4	31,4	31,1	29,7
Pilipina	3,3	3,9	8,2	7,9	5,0	10,3	15,9	11,3	9,1	8,4	10,1	9,0	17,0	18,4
Muangthai	66,0	61,1	46,2	41,0	47,8	47,5	42,4	28,9	19,6	12,8	11,4	11,5	15,5	20,4
Indonesia	13,0	13,1	10,3	27,8	13,5	18,0	16,2	19,5	32,0	41,2	16,2	24,8	31,8	29,2

a) Ekspor Ke dan Impor Dari Kelompok Negara Berkembang di Kawasan Asia-Pasifik, terdiri dari Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Malaysia, Pilipina, Muangthai, Indonesia

b) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan Kawasan Asia-Pasifik

Sumber: Diolah dari IMF, *Direction of Trade* (berbagai nomor penerbitan)

Tabel 6

Matriks Perdagangan Intra-Kawasan Asia-Pasifik, 1978

Ekspor Ke ^{a)}	Impor Dari ^{a)}																										
	Amerika Serikat	Kanada	Australia	Jepang	Selandia Baru	Singapura	Hong Kong	Taiwan	Korea	Malaysia	Filipina	Muangthai	Indonesia														
Amerika Serikat		50,4	40,5	5,2	2,2	22,9	30,9	0,7	0,7	2,6	1,3	2,9	4,4	4,2	6,7	5,6	4,8	1,3	1,9	1,8	1,6	1,1	0,6	1,3	4,5		
Kanada	89,6			1,0	0,9	7,4	5,8	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,8	0,2	1,0	0,5	0,9	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	
Australia	18,1	37,9		3,2	4,2																						
Jepang	48,9	38,3		3,6	8,2	5,2	13,7																				
Selandia Baru	28,1	25,3		4,4	4,4	22,3	36,5																				
Singapura	25,8	22,7		1,6	0,8	6,5		16,6	33,8			1,6															
Hong Kong	50,5	21,2		4,1	1,2	5,4	3,6	12,8	40,6			0,7	0,7	7,7	9,1												
Taiwan	54,1	31,4		3,5	1,4	3,6	4,3	17,0	48,6			0,2	0,5	3,2	1,1	9,2	2,0										
Korea	49,3	28,6		4,0	1,9	1,8	4,1	32,5	55,5			0,3	0,9	1,8	0,5	4,4	0,6	1,6	1,3								
Malaysia	27,6	21,4		1,0	1,6	2,7	9,9	32,1	35,6			1,0	1,6	24,0	13,1	2,3	2,8	3,2	3,5	2,6	1,5						
Filipina	45,8	31,8		1,7	1,5	3,0	5,6	33,5	41,1			0,1	1,4	3,1	1,4	3,4	3,7	1,8	4,3	2,5	1,9	1,6	1,8				
Muangthai	19,1	22,5		0,5	1,9	1,6	3,6	36,3	51,1			0,1	0,6	13,5	6,5	9,4	2,4	2,3	5,4	1,4	2,5	9,9	2,5	0,9	0,2		
Indonesia	33,0	17,6		0,3	1,6	1,2	5,2	49,0	45,5			0,1	0,9	8,0	8,2	0,4	5,3	2,7	7,3	2,9	2,2	0,3	0,5	1,7	1,5	0,2	4,1

a) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan Kawasan Asia-Pasifik

Sumber: Diolah dari IMF, *Direction of Trade Yearbook 1979*

15,5% (1961) menjadi 25,7% (1978). Perkembangan yang sama juga ditunjukkan oleh negara-negara industri lainnya di kawasan ini.

Di antara negara-negara industri di Kawasan Asia-Pasifik peranan Amerika Serikat dan Jepang masih terbesar dan jauh melebihi peranan negara-negara lain. Seperti terlihat dalam Tabel 3, dari keseluruhan perdagangan (ekspor dan impor) di Asia-Pasifik, pada tahun 1978 bagian dari Amerika Serikat adalah 41,6% dan bagian dari Jepang adalah 22,7%. Bagi Amerika Serikat, Kanada masih merupakan sumber impor yang terutama yaitu 40,5% dari keseluruhan impornya dari Kawasan Asia-Pasifik, disusul oleh Jepang sebesar 30,9% Kawasan Asia Timur (Korea, Taiwan, Hong Kong) sebesar 15,9%, ASEAN sebesar 9,9% dan Australia dengan Selandia Baru secara bersama-sama sebesar 2,9% (tahun 1978). Sedangkan bagi Jepang terdapat urutan impor sebagai berikut (tahun 1978): Amerika Serikat (38,3%) ASEAN (25,6%), Australia dan Selandia Baru (15,4%), Asia Timur (12,5%) dan Kanada (8,2%).¹

Dalam kelompok negara-negara berkembang di kawasan ini terdapat dua pola perkembangan yang berbeda. Negara-negara berkembang yang telah maju dalam industrialisasinya seperti Korea, Taiwan, dan Hong Kong, selama periode 1961-1978 ini secara menyolok meningkatkan eksportnya ke negara-negara industri, tetapi pada saat bersamaan juga telah meningkatkan impornya dari kelompok negara-negara berkembang di kawasan ini. Tabel 4 menunjukkan bahwa ekspor Hong Kong ke kelompok negara industri di Kawasan Asia-Pasifik meningkat dari 54,7% (1961) menjadi 73,5% (1978). Impor Hong Kong dari kelompok negara industri menurun dari 72,9% (1961) menjadi 67,3% (1978). Artinya impor dari kelompok negara berkembang meningkat dari 27,1% (1961) menjadi 32,7% (1978). Kelompok negara berkembang lainnya, yaitu negara-negara ASEAN, hampir semuanya meningkatkan bagian dari ekspor dan impornya dengan kelompok negara berkembang. Ekspor Malaysia ke kelompok negara berkembang di Asia-Pasifik meningkat dari

1 Lihat Tabel 6

9,4% (1961) menjadi 35,6% (1978) dari seluruh eksportnya ke kawasan ini (Tabel 5). Di antara negara-negara ASEAN perkembangan Muangthai merupakan pengecualian; selama periode 1961-1978 ini baik eksportnya ke maupun impornya dari kelompok negara industri mengalami peningkatan. Perkembangan ini mungkin dapat dimengerti karena dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, pada tahun 1961 ekspor Muangthai ke kelompok negara industri (34%) dari keseluruhan eksportnya ke kawasan ini berada jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya, misalnya Filipina (96,7%), Malaysia (90,6%) dan Indonesia (87%).

Tabel 6 menggambarkan arus pertukangan barang (ekspor dan impor) antara negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik dalam tahun 1978. Seperti disebutkan terdahulu, bagi kawasan ini Amerika Serikat dan Jepang merupakan pasaran yang utama, baik sebagai pasaran bahan-bahan mentah maupun pasaran barang-barang industri manufacturing, baik yang berasal dari kelompok negara industri maupun kelompok negara berkembang. Tetapi matriks perdagangan intra-kawasan ini (Tabel 6) menunjukkan bahwa perkembangan selama periode 1961-1978 ini belum menghasilkan interdependensi yang simetris antara kelompok negara industri dengan kelompok negara berkembang, khususnya ASEAN. Namun demikian terlihat adanya kaitan-kaitan baru yang memberikan kesan adanya pentahapan-pentahapan dalam pola interaksi hubungan ekonomi — perdagangan yang selaras dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Interdependensi ekonomi telah menjadi lebih simetris antara kelompok negara industri dengan kelompok negara berkembang yang maju dalam industrialisasinya (Korea, Taiwan, Hong Kong) dan antara negara-negara ini dengan kelompok negara berkembang lainnya (negara-negara ASEAN). Bagaimana perkembangan selanjutnya masih merupakan tanda tanya, oleh karena seperti diuraikan sebelumnya, interdependensi yang meningkat itu juga mempunyai persoalan-persoalannya tersendiri.

Tahun 1978 dapat dianggap telah merupakan salah satu batu ujian bagi perkembangan ekonomi di Kawasan Asia-Pasifik ini.

Potensi-potensi ke arah pola hubungan ekonomi yang sehat di kawasan ini ternyata tetap ada biarpun dalam situasi yang penuh kesulitan dalam tahun 1978. Suatu survei oleh harian *The Asian Wall Street Journal* dalam bulan September 1978 beranggapan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan ini cukup memadai dalam tahun 1978 ini walaupun para perencana ekonomi dihadapi oleh masalah-masalah yang sulit.

Proteksionisme memang merupakan gangguan tetapi bukan merupakan hambatan utama bagi ekspor oleh negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik ini. Ekspor oleh negara-negara berkembang di kawasan ini meningkat dengan pesat dan merupakan bagian yang besar dari ekspor negara-negara berkembang secara keseluruhan. Selain itu, di sektor industri manufacturing di negara-negara berkembang di kawasan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan "economies of scale" yang secara potensial ada. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa pertumbuhan ekspor oleh negara-negara ini masih akan meningkat di masa yang akan datang.

Negara-negara di kawasan ini yang mengalami pertumbuhan ekspor yang paling pesat adalah Taiwan, Korea dan Hong Kong, dan memang negara-negara ini telah menjadi sasaran utama dari negara-negara industri dalam pembatasan-pembatasan impor. Walaupun demikian negara-negara telah dapat mempertahankan tingkat ekspor yang tinggi, terutama karena usaha diversifikasi produk secara terus-menerus. Di balik negara-negara ini terdapat negara-negara yang mulai muncul sebagai eksportir hasil-hasil industri manufacturing (negara-negara ASEAN). Negara-negara ini sedikit demi sedikit akan mengambil alih industri-industri ekspor yang berada di negara-negara berkembang yang sudah maju, yang juga harus naik anak tangga pembangunan. Proses serupa ini dapat disebut sebagai proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) dan sejauh ini telah merupakan sebab utama bahwa pertumbuhan dan dinamika ekonomi di Kawasan Asia-Pasifik dapat dipertahankan.

Tabel 7 menunjukkan struktur ekspor dan impor negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik, untuk tahun 1970 dan tahun

ANALISA

Tabel 7

STRUKTUR EKSPOR DAN IMPOR NEGARA-NEGARA ASIA-PASIFIK

	Hasil-hasil Industri Manufacturing Sebagai Bagian Dari Total: a)			
	<i>Ekspor</i>		<i>Impor</i>	
	1970	1976	1970	1976
<i>Neg. Industri</i>				
Amerika Serikat	60	67	41	54
Kanada	29	48	67	76
Australia	8	21	68	80
Jepang	51	90	17	18
Selandia Baru	3	12	68	73
<i>Neg. Berkembang</i>				
Singapura	21	40	26	53
Hong Kong	35	53	54	67
Taiwan	...	55	...	58
Korea	6	52	58	52
Malaysia	6	14	42	62
Pilipina	3	20	70	61
Muangthai	2	11	68	63
Indonesia	0	2	62	72

a) Dinyatakan dalam persen total ekspor atau impor dengan dunia

Sumber: Diolah dari World Bank, *World Development Report 1979*

1976. Selama periode yang singkat ini terjadi perkembangan yang cukup menyolok dalam struktur ekspor dan impor di negara-negara Asia-Pasifik, secara khususnya seperti yang ditunjukkan dalam bagian hasil-hasil industri manufacturing dalam ekspor dan impor mereka. Tabel ini menunjukkan bahwa baik dalam komposisi ekspor maupun impor telah terjadi kenaikan bagian dari hasil-hasil industri manufacturing. Hal ini berlaku untuk kelompok negara industri maupun untuk kelompok negara berkembang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perkembangan struktural ekonomi-ekonomi kelompok negara berkembang ke arah industrialisasi memperbesar interaksinya dengan kelompok negara industri, dan bukan memperkecil hubungan ekonomi antara mereka. Industrialisasi di kelompok negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik telah mengambil alih industri-industri di kelompok negara maju yang sudah menjadi lapuk dan lapuh, dan karena itu sudah tidak dapat bersaing. Pasaran ini digantikan oleh ekspor dari kelompok negara berkembang. Sebaliknya untuk menyelenggarakan industrialisasi ini negara-negara berkembang meningkatkan impor barang-barang modal dari negara-negara industri. Dengan demikian interaksi ekonomi dua arah ini menjadi semakin intensif dan saling menguntungkan.

Investasi di negara-negara berkembang ini Kawasan Asia-Pasifik ini telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi daripada di bagian lain dari Dunia Ketiga. Hal ini merupakan faktor utama terjadinya proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) di Kawasan Asia-Pasifik ini. Dari keseluruhan investasi langsung dari Jepang ke luar negeri sebesar US\$ 3 milyar (tahun anggaran 1977), sekitar 21% atau US\$ 640 juta ditujukan ke ASEAN. Dari jumlah penanaman modal Amerika Serikat ke luar negeri sebesar lebih dari US\$ 3 milyar (1978), sekitar 35% ditujukan kepada negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik. Tabel 8 menunjukkan perkembangan investasi, pertumbuhan industri manufacturing, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekspor di negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik. Data-data ini memberikan gambaran yang singkat tentang arah perkembangan ekonomi di kawasan ini seperti diuraikan di atas.

Tabel 8

PERKEMBANGAN PERDAGANGAN DAN EKONOMI NEGARA-NEGARA ASIA-PASIFIK 1960-1977

	Pertumbuhan Ekspor (% per tahun rata-rata)		a) Pertumbuhan Ekonomi (PDB) (% per tahun rata-rata)		Ekspor Sebagai % PDB		Pertumbuhan Investasi (% per tahun rata-rata)		Investasi Sebagai % PDB		Ratio Pertumbuhan Industri Manufacturing Dan Pertumbuhan PDB	
	1960-1970	1970-1977	1960-1970	1970-1977	1960	1977	1960-1970	1970	1960	1977	1960-1970	1970-1977
	<i>Neg. Industri</i>											
Amerika Serikat	6,0	6,9	4,3	2,8	5	8	4,8	0,7	18	18	1,23	0,86
Kanada	9,9	3,7	5,6	4,7	18	24	5,8	5,6	23	23	1,20	0,79
Australia	6,5	3,7	4,1	3,8	15	16	6,2	1,5	29	28	1,37	1,03
Jepang	17,5	10,5	10,5	5,3	11	14	14,0	2,4	34	32	1,05	1,08
Selandia Baru	4,6	2,4	3,9	2,0	23	28	24	28
<i>Neg. Berkembang</i>												
Singapura	4,2	9,8	8,8	8,6	163	160	20,5	5,7	11	34	1,48	1,03
Hong Kong	12,7	6,5	10,0	8,2	79	98	7,4	9,7	19	25	...	0,77
Taiwan	23,7	16,7	9,2	7,7	11	54	16,2	9,1	20	27	1,88	1,62
Korea	35,2	30,7	8,5	10,4	3	40	23,1	12,4	11	26	2,02	1,86
Malaysia	6,1	5,2	6,5	7,8	54	50	7,2	10,0	14	23	...	1,58
Pilipina	2,2	5,0	5,1	6,4	11	19	8,2	11,7	16	30	1,31	1,06
Muangthai	5,2	12,1	8,2	7,1	17	22	15,4	6,3	16	26	1,34	1,58
Indonesia	3,5	7,5	3,5	7,7	13	22	4,8	16,6	8	21	0,94	1,47

a) PDB = Produk Domestik Bruto (GDP)

Sumber: Diolah dari World Bank, *World Development Report 1979*

Prospek selanjutnya dari proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) yang diuraikan di atas dapat dihambat oleh dua faktor utama, yaitu:

- a) terjadinya lagi instabilitas dalam sistem moneter internasional;
- b) menurunnya pertumbuhan ekonomi (PDB) dan permintaan untuk impor di negara-negara industri.

Ketidakstabilan sistem moneter internasional selama tahun-tahun terakhir ini ditandai oleh merosotnya nilai dollar dan meningkatnya nilai yen secara dramatis. Perkembangan-perkembangan nilai mata-uang itu mempengaruhi perdagangan luar negeri, produksi, lapangan kerja, neraca pembayaran, tingkat inflasi, dan daya saing ekspor.

Kelompok negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik telah mengalami pengaruh yang besar dari perkembangan nilai mata-uang di atas. Jepang merupakan rekanan utama negara-negara ini untuk barang-barang modal dan barang-barang setengah-jadi yang dibutuhkan oleh industri manufacturing mereka. Sementara itu Amerika Serikat merupakan pasaran ekspor utama bagi hasil-hasil industri manufacturing dari negara-negara berkembang. Dengan demikian, perkembangan nilai mata-uang di atas telah mengakibatkan meningkatnya harga impor dan menurunnya nilai ekspor negara-negara berkembang tersebut. Oleh karena struktur hubungan yang sedemikian ini maka banyak negara di Kawasan Asia-Pasifik ini untuk membiarkan nilai mata-uangnya ikut merosot dengan nilai dollar (depresiasi) untuk mempertahankan daya saing ekspornya. Selaras dengan "cheap yen policy" yang dijalankan Jepang, banyak negara membiarkan mata-uang mereka "undervalued" dengan harapan dapat mempertahankan pertumbuhannya guna membantu pembangunan struktur industri yang semakin luas. Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipina dan Malaysia mengharapkan dapat mengambil peluang untuk mengambil alih sektor-sektor ekspor di mana Jepang tidak lagi dapat bersaing. Formula serupa ini telah dilakukan beberapa tahun yang lalu di sektor industri tekstil.

Perkembangan di atas menunjukkan bagaimana ekonomi-ekonomi yang berada pada tahapan pembangunan yang berbeda dapat saling mengisi (bersifat komplementer) dan tidak perlu menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Tampaknya, prospek yang terbaik bagi negara-negara berkembang di kawasan ini untuk mengambil alih peranan Jepang bukan terletak pada sektor industri barang-barang konsumen yang padat karya, tetapi di sektor-sektor industri dasar besi dan baja serta barang-barang kimia. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan-perusahaan Jepang tampaknya berkecenderungan untuk memindahkan industri manufacturingnya di negara-negara industri yang merupakan pasaran utamanya karena pertimbangan proteksi yang mungkin akan diambil oleh negara-negara industri tersebut.

Dalam keadaan di mana moneter internasional berada dalam ketidakstabilan negara-negara pengekspor bahan-bahan primer merupakan pihak yang paling dirugikan. Negara-negara pengekspor bahan-bahan primer di Asia Tenggara secara langsung merasakan akibat keadaan ini. Memburuknya "terms-of-trade" yang diderita negara-negara ASEAN sebagai akibat meningkatnya nilai yen kerap kali tidak dapat diimbangi oleh kenaikan harga komoditi-komoditi mereka.

Kekhawatiran kedua di pihak negara-negara berkembang di kawasan ini menyangkut prospek pertumbuhan ekonomi di negara-negara industri. Selama tahun-tahun terakhir ini Jepang telah mampu mengelola pertumbuhan PDB yang cukup tinggi. Namun pada saat ini terdapat beberapa persoalan dengan pertumbuhan Jepang, yaitu oleh karena komponen utama pertumbuhan tersebut adalah ekspornya, sementara permintaan dalam negeri dan investasinya tetap lemah (sluggish).¹ Hal ini telah mengakibatkan surplus yang besar dalam neraca perdagangannya, hal mana mengganggu negara-negara lain. Kelemahan investasi di Jepang tampaknya bersifat struktural, terutama

1 Untuk uraian yang terperinci mengenai hal ini lihat R.B. Soehartono, "World Economy and Japan", dalam *Japan-Indonesia Relations in A Global Context* (Tokyo: Japan Institute of International Affairs, October 1978)

sebagai akibat dari kenyataan bahwa Jepang tidak lagi dapat mendasarkan diri pada peningkatan yang luar biasa dalam produksi barang-barang manufacturingnya, khususnya untuk ekspor. Sementara ini Jepang telah menyatakan kesediaan untuk mengurangi surplusnya, tetapi hal ini lebih banyak dilakukan melalui pembelian barang-barang modal berteknologi tinggi dari negara-negara industri (misalnya pesawat terbang) daripada meningkatkan impor hasil-hasil industri manufacturing negara-negara berkembang.

Untuk jangka panjang, Jepang hanya dapat mengatasi masalah neraca pembayarannya melalui usaha penyesuaian-penyesuaian struktural ekonominya. Khususnya dalam keadaan di mana nilai yen tetap tinggi dan investasi dalam negeri yang lemah, maka ekonomi Jepang tampaknya akan bergeser ke arah "ekonomi pengetahuan" (knowledge economy), yaitu jasa-jasa dan aktivitas ekonomi berteknologi tinggi lainnya. Dengan perubahan struktur ekonomi ini maka permintaan untuk impor bahan-bahan mentah dari Asia Tenggara akan menurun. Keadaan ini sebenarnya memberikan peluang kepada negara-negara berkembang yang maju industrinya di kawasan ini untuk mengambil alih jenis-jenis kegiatan yang ditinggalkan oleh perubahan struktural ekonomi Jepang.

Sejak resesi tahun 1975 Amerika Serikat telah memainkan peranan utama sebagai lokomotif untuk menggerakkan ekonomi-ekonomi beberapa negara. Penurunan dalam pertumbuhan PDB Amerika Serikat juga merupakan ancaman bagi negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik. Dalam keadaan ini juga terdapat bahaya bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan-tindakan proteksi terhadap negara-negara berkembang yang maju industrinya. Hal ini dapat menimbulkan stagnasi dalam proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) yang melibatkan negara-negara berkembang lainnya di Kawasan Asia-Pasifik ini (ASEAN).

Faktor utama yang telah memungkinkan negara-negara berkembang di Kawasan Asia-Pasifik ini meningkatkan pertum-

buhan ekonominya adalah akses ke pasaran modal internasional. Kredit perbankan internasional untuk waktu yang akan datang masih akan tersedia untuk negara-negara berkembang di kawasan ini.¹ Walaupun tingkat bunga mengalami peningkatan yang terus-menerus, tetapi "spread" (bunga di atas LIBOR) telah menurun dan jangka waktu pinjaman telah menjadi semakin panjang. Beberapa negara, seperti Indonesia dan hingga beberapa waktu baru-baru ini juga Pilipina, menetapkan batas pinjaman secara komersial. Di negara-negara berkembang ini sektor negara telah memainkan peranan yang penting. Hal ini dimungkinkan oleh karena mudahnya akses ke pasaran modal internasional, dan oleh karena meningkatnya arus bantuan luar negeri secara bilateral maupun multilateral. Beberapa negara telah meningkatkan pengeluaran pemerintah karena meningkatnya pendapatan sehubungan dengan meningkatnya harga ekspor, seperti minyak bumi untuk Indonesia. Tetapi peningkatan pengeluaran pemerintah dengan tingkat yang dialami dalam tahun-tahun yang lalu ini mungkin tidak dapat diteruskan secara berkepanjangan. Hal ini berarti bahwa sektor swasta di negara-negara ini harus mengambil peranan yang lebih besar untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperlukan.

PENUTUP

Pada umumnya negara-negara ASEAN masih cukup rawan terhadap perkembangan-perkembangan yang disebutkan di atas. Tetapi perubahan pola perdagangan dan investasi yang sekarang sedang terjadi di Kawasan Asia-Pasifik dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN untuk mengubah kerawanan ekonominya terhadap perkembangan-perkembangan dunia ke arah kepekaan ekonomi yang dapat diatur secara bersama-sama. Negara-negara ASEAN ini perlu mengambil peranan yang lebih besar dalam proses penyesuaian secara berurutan (rolling adjustment) yang dibahas sebelumnya. Tetapi dalam persiapan-persiapan ini negara-negara ini juga perlu memperhitungkan bahwa di masa

1 Lihat "The Uncontrollable 'Stateless Money' ", *Far Eastern Economic Review*, 21 September 1979

yang akan datang ini mereka mungkin akan menghadapi kelangkaan (crowding out) modal internasional yang selama ini telah membiayai pembangunan di negara-negara ini.

Kelangkaan ini mungkin tidak berbentuk kekurangan jumlah modal yang dapat disediakan oleh pasaran modal internasional, tetapi lebih banyak disebabkan oleh tidak tersedianya instrumen pembiayaan yang tepat bagi negara-negara ini untuk melakukan perubahan struktural dari negara-negara pengekspor bahan-bahan mentah menjadi "full-fledged trading nations". Demikian pula jenis-jenis usaha yang akan dibangun mungkin meminta modal yang lebih banyak dalam bentuk "equity capital". Modal serupa ini harus dapat disediakan oleh ekonomi-ekonomi nasional itu sendiri.